

PERAN ILMU-ILMU BUDAYA DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA NASIONAL

*Herwandi**

ABSTRACT

It seems that cultural science has been marginalized in Indonesian development. This marginalization might be the result of the continuity of the history of science. The cultural science is considered worthless; meanwhile the natural science with its divisions are regarded as the proper science as they may be used to face the problems encountered in Indonesia. The cultural science should possess the central roles in giving the touch of humanity to every aspect of life in this nation.

Key words : ilmu budaya, peran, perkembangan budaya

PENGANTAR

Saat ini, pembangunan di Indonesia lebih diarahkan kepada aspek teknologi dan industri daripada aspek sosial dan kebudayaan; kalau pun ada yang menyentuh aspek kebudayaan, hanyalah sebagai pelengkap dan itu pun untuk menyokong teknologi dan industrialisasi. Pembangunan kebudayaan pun diarahkan untuk pengembangan teknologi dan industrialisasi budaya. Akibatnya, pembangunan dirasakan hampa, kurang muatan nilai kemanusiaan. Akar permasalahannya adalah kurangnya peran serta ilmu budaya yang diposisikan pada tempat yang tidak begitu strategis untuk menentukan arah dalam proses pembangunan bangsa ini, termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan kebudayaan nasional. Padahal, ilmu budaya seharusnya mendapat peran sentral dan tempat yang lebih utama dalam menentukan strategi pembangunan nasional agar pembangunan dapat berpihak kepada masyarakat ramai. Berangkat dari pemikiran tersebut, tulisan ini mencoba melihat

peran serta ilmu budaya dalam strategi pembangunan nasional Indonesia. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan: mengapa ilmu budaya tidak mendapat peran semestinya dalam pembangunan, termasuk pengembangan budaya nasional Indonesia, dan peran apa sebetulnya yang dapat dilakukan oleh ilmu budaya dalam pengembangan strategi pembangunan dan arah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia?

ILMU BUDAYA: ANTARA ILMU ALAM DAN ILMU SOSIAL

Secara umum, pada awalnya ilmu (*science*) dapat dikelompokkan atas dua bidang utama, yaitu ilmu alam (*natural science*) dan ilmu sosial (*social science*).² Dari dua kategori ilmu tersebut kemudian berkembanglah beberapa cabang ilmu lain: ilmu alam berpecah menjadi dua bagian lagi, yaitu ilmu fisika (*physical science*) dan ilmu hayat (*biological science*) yang kemudian juga membagi diri atas beragam rantingnya; dan

* Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang

ilmu sosial (meskipun cukup tertinggal dari ilmu alam) saat ini menjadi beberapa cabang antara lain antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, ilmu politik (Suriasumantri, 2000; 93-94), tetapi ada juga yang memasukkan ilmu sejarah (Manan, 2002:2), dan geografi (Fenton, 1967: 1; Banks, 1985; 247-404).

Pada tahun 1894, Windelband mengemukakan dua pembagian utama ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang berusaha membuat hukum-hukum umum yang disebutnya dengan *nomotetis*³, dan ilmu-ilmu yang melukiskan peristiwa-peristiwa individual, unik, yang tak pernah berulang lagi, yang disebutnya dengan ilmu *ideografis* (Beerling, 1986:91; Kartodirdjo, 1970:61). Berdasarkan pembagian tersebut, ilmu alam bersifat *nomotetis*, yaitu ilmu yang berusaha menyusun hukum-hukum yang berlaku umum dan objektif, sedangkan ilmu-ilmu sosial tergolong kepada ilmu *ideografis*, yang berdasarkan pada keunikan yang berlaku hanya sekali.⁴

Dalam perkembangan sejarah keilmuan, ada anggapan bahwa ilmu yang paling “benar” adalah ilmu alam sehingga semua ilmu pengetahuan sepertinya diarahkan sama dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu harus melalui metode dan cara kerja ilmu pengetahuan alam. Ilmu sosial sepertinya dipandang sebelah mata, “ilmu yang harus dimasukkan keranjang sampah” karena tak memenuhi standar ilmiah yang dapat disamakan dengan ilmu alam. Hal demikian menuntut bahwa kalau ingin dikategorikan sebagai ilmu yang ilmiah, ilmu sosial pun harus berusaha menyusun hukum-hukum yang berlaku umum, ilmu sosial juga harus memakai model-model ilmiah, formula, rumus-rumus, bahkan harus memakai konstanta-konstanta baku. Dalam perjalanan sejarah keilmuan muncullah apa yang disebut dengan *ilmu sosial nomotetis*, dan *Ilmu sosial positivistik* (Wallerstein, 1997); artinya, beberapa cabang ilmu sosial juga tertarik untuk memasuki tradisi yang berlaku di dalam ilmu-ilmu alam. Berdasarkan perkembangannya, ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang paling awal mengalami intervensi metode ilmu alam sehingga ilmu ini juga

menelusuri dan menyusun hukum-hukum yang berlaku universal, yang positivistik, memakai model, formula yang melibatkan konstanta-konstanta baku.

Anggapan seperti ini ternyata menimbulkan banyak reaksi, paling tidak mulai pada abad ke-19, dengan munculnya pemikiran bahwa tidak mungkin ilmu-ilmu lain selain ilmu alam untuk bekerja seperti yang dilakukan ilmu alam tersebut. Reaksi itu diawali oleh Ricket yang dengan keras menolak keberadaan ilmu alam dalam cara kerja ilmu sosial.⁵ Ia menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam (*natur wissenschaften*) dan ilmu-ilmu sosial (*social wissenschaften*) adalah ilmu-ilmu yang memiliki objek yang berbeda sehingga harus dilakukan dengan metode yang berbeda. Ia menolak keseragaman metode antara *natur wissenschaften* dengan *social wissenschaften* karena bertolak dari dasar yang berbeda. Meskipun kedua ilmu itu sama-sama mempelajari tentang manusia, ia melihat adanya dua realitas yang berbeda. Apakah manusia sebagai “diri” yang unik atau manusia sebagai gumpalan daging yang membentuk struktur jasmani yang dapat diperbandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Weber (via Kartodirdjo, 1970:58-72) menyatakan tidak bisa disamakan antara ilmu sosial dengan ilmu alam. Weber menyarankan suatu metode berbeda dengan ilmu alam, karena kasus-kasus unik tidak bisa digeneralisasikan. Meskipun telah dilakukan usaha-usaha untuk memisahkan antara metode ilmu alam dengan ilmu sosial, ternyata di kalangan ilmu sosial sangat sulit menghilangkan adanya pengaruh ilmu alam dalam ilmu-ilmu mereka.

Sementara itu, di dalam perjalanan sejarah keilmuan, pada abad ke-19 muncul istilah *geisteswissenschaften* di Jerman. Istilah ini dapat dijadikan pokok pangkal munculnya ilmu-ilmu budaya meskipun beberapa di antaranya sudah muncul. *Geisteswissenschaften* yang dalam bahasa Jerman secara harfiah dapat berarti sebagai pengetahuan spiritual atau urusan-urusan mental kemudian semakin meluas pemakaiannya untuk penamaan terhadap kelompok ilmu-ilmu kemanusiaan

yang menghimpun ilmu kesenian, kesusasteraan, filsafat, dan kebudayaan. Istilah ini sama pengertiannya dengan ilmu *humanities* dalam bahasa Inggris, yang di telinga kita akrab dengan istilah ilmu humaniora, dan “diterjemahkan” oleh DIKTI menjadi ilmu budaya. Di antara ilmu-ilmu yang digolongkan ke dalam ilmu humaniora itu antara lain filsafat, etika, estetika, sejarah, bahasa dan sastra, ilmu hukum, ilmu purbakala, perbandingan agama, dan kritik seni (Imron, 2000:65).

Dilthey mengatakan bahwa terdapat dua kelompok bidang ilmu, yaitu *naturwissenschaften* dan *geisteswissenschaften*.⁶ *Naturwissenschaften* adalah kelompok ilmu-ilmu alam yang mengkaji fisik, sedangkan kelompok *geisteswissenschaften* adalah kelompok ilmu-ilmu budaya yang mengkaji manusia dalam pengertian konteks kehidupan. Ia juga menolak persamaan metode, dan mengatakan bahwa *erklären* (metode menjelaskan) adalah metode yang cocok untuk ilmu alam, sedangkan *verstehen* (metode memahami) adalah metode untuk ilmu budaya (Leksono-Supeli, 1997).

Menurut Wallerstein (1997), sejarah intelektual abad ke-19 ditandai oleh profesionalisasi dan pembedaan pengetahuan ke dalam disiplin-disiplin ilmu melalui penciptaan susunan instusional yang mapan. Timbulnya berbagai disiplin ilmu bertolak dari premis bahwa riset-riset sistemik membutuhkan perlunya konsentrasi kemampuan ilmuan terhadap beragam arena realitas yang tersekat-sekat yang secara rasional terpilah-pilah ke dalam berbagai kelompok pengetahuan yang berbeda-beda. Namun demikian setidaknya semenjak setelah perang dunia II cara pandang seperti itu sudah ditinggalkan karena tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dunia yang semakin kompleks. Cara kerja ilmuwan sosial yang terkotak-kotak tersebut dianggap tidak memadai untuk untuk menjelaskan berbagai fenomena masyarakat dunia baru tersebut. Paling tidak semenjak akhir 1960-an muncullah berbagai bidang-bidang baru yang berorientasi keada *problem oriented studies* dengan melibatkan

berbagai disiplin ilmu (multi-disipliner). Kemudian, orang mengenal berbagai kajian seperti kajian wilayah, kajian pembangunan, kajian perempuan, kajian kebudayaan, kajian media, kajian pedesaan, dan lain-lain (Wallerstein, 1997).

Dari yang disinyalir oleh Wallerstein, di Indonesia ternyata muncul dengan kondisi yang berbeda. Pada saat munculnya beberapa *problem oriented studies*, beberapa kelompok ilmu justru memilih untuk terlebih dahulu “memperkuat kuda-kuda”, memantapkan bidang-bidang kajian yang mereka geluti sehingga yang muncul adalah penyekatan-penyekatan pengetahuan. Artinya, di saat terjadi bersatunya beberapa bidang ilmu dalam *problem oriented studies*, justru proses pematangan setiap bidang kajian tetap berjalan. Bidang ilmu humaniora, misalnya, selama ini berada di bawah konsorsium sastra dan filsafat, ternyata kemudian secara lambat tetapi pasti dilihat sebagai konsorsium yang tidak memadai untuk mengorganisasi bidang-bidang ilmu yang seharusnya ada. Penamaan nama Fakultas Sastra saja terhadap beberapa bidang ilmu kemanusiaan ternyata tidak dapat mengakomodasi beberapa bidang ilmu yang ada di dalamnya sehingga beberapa Fakultas Sastra di Indonesia perlu melakukan perubahan nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Perubahan nama tersebut diikuti dengan pentajaman substansi ilmu yang mengarah kepada profesionalitas keilmuan yang semakin tajam.

PERAN ILMU BUDAYA DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Kebudayaan Indonesia merupakan gabungan dari kebudayaan beragam etnis yang berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan sosial. Oleh karena itu, kebudayaan nasional Indonesia harus dilihat dari dua sisi yang berbeda, tetapi saling menyokong antara satu dengan yang lain. Pada sisi tertentu, kebudayaan nasional dapat dilihat sebagai kebudayaan yang “jamak”, heterogen, karena

ditumbuhi oleh berbagai kebudayaan “daerah”. Kejamakan tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya perpecahan dan tercerai berai sehingga mengancam kesatuan bangsa. Di sisi lain, kebudayaan nasional dapat pula dilihat sebagai suatu kesatuan tunggal yang mungkin saja diikat oleh kesamaan elemen budaya yang dimiliki oleh berbagai budaya tersebut. Dalam hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional, masing-masing kebudayaan itu harus ditempatkan pada porsi yang sama secara proporsional dan perlu dihindarkan adanya politik kebudayaan yang menganggap suatu etnis menduduki prioritas yang lebih jika dibandingkan dengan yang lain. Di samping itu, masing-masing kebudayaan tersebut perlu digali dan dikaji lebih jauh untuk menumbuhkan kebudayaan nasional tersebut sembari mencari elemen-elemen budaya yang berpotensi untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesatuan antar etnis. Apakah peran ilmu budaya untuk pengembangan kebudayaan nasional tersebut?

Peran ilmu budaya dalam pengembangan kebudayaan nasional dapat dipilah atas dua tataran yang berbeda. Pada tataran pertama adalah peran ilmu budaya secara normatif dan yang kedua adalah pada tataran praktis. Untuk menjelaskan peran ilmu budaya pada tataran normatif sebaiknya dirujuk apa yang dikemukakan oleh Suriasumantri. Suriasumantri menyatakan bahwa peran ilmu secara umum (berlaku untuk semua ilmu) dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional mempunyai peran ganda. Pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan nasional. Kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa. Suriasumantri juga menyatakan bahwa pada kenyataannya kedua fungsi tersebut terpadu satu sama lain dan sukar dibedakan (Suriasumantri, 2000:272). Suriasumantri mengajukan 7 unsur nilai yang terpancar dari hakikat keilmuan, yaitu kritis, rasional, logis, obyektif, terbuka, menjunjung kebenaran dan pengabdian universal. Ia menyatakan bahwa

“dalam pembentukan karakter bangsa, sekiranya bangsa Indonesia bertujuan menjadi bangsa yang moderen, maka ketujuh unsur tersebut akan konsisten sekali. Bangsa moderen akan menghadapi berbagai permasalahan dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, teknologi, pendidikan dan lain-lain yang membutuhkan cara pemecahan masalah secara kritis, rasional dan logis, obyektif dan terbuka. Sedangkan sifat menjunjung kebenaran dan pengabdian universal akan merupakan faktor penting dalam pembinaan bangsa (*nation building*)” (Suriasumantri, 2000:275).

Dalam pernyataan tersebut tersirat bahwa di samping ilmu berperan sebagai sumber nilai, ada pula pesan yang mendasar bahwa cara berpikir keilmuan perlu dibudayakan sehingga masyarakat Indonesia terbiasa berpikir secara kritis, logis, rasional, obyektif, terbuka, menjunjung kebenaran. Sehubungan dengan hal tersebut, ilmu budaya juga merupakan sumber nilai untuk pengembangan budaya nasional tersebut. Ilmu budaya mengemban peran normatif untuk membangun karakter bangsa ini seperti yang digambarkan oleh Suriasumantri.

Pada tataran praktis ilmu budaya sebetulnya punya peran yang sangat signifikan dalam pembangunan dan pengembangan kebudayaan nasional. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, selain kepentingan pengajaran, ilmu budaya dapat melakukan perannya secara maksimal dalam pembangunan. Mulai dari unsur pengabdian masyarakat, ilmuan budaya dapat melakukan peran praktisnya melalui kegiatan “pengabdian” dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, melalui penelitian-penelitian ilmuwan budaya dapat melakukan pengkajian-pengkajian yang mendalam kepada setiap budaya daerah untuk mendeteksi secara dini potensi “baik” dan “buruk” masing-masing kebudayaan. Ilmuwan budaya dapat mengkaji elemen-elemen budaya yang positif memiliki kesamaan nilai sehingga berpotensi untuk menjadi perekat antarbudaya yang ada di Indonesia. Di samping itu, ilmuwan budaya dapat juga mendeteksi elemen-elemen

budaya yang berpotensi memecah belah. Dalam hal ini, mereka akan melakukan pemetaan potensi-potensi tersebut dan menawarkan solusinya kepada pihak pemerintah untuk pengembangan dan pembangunan kebudayaan tersebut.

Permasalahan yang sesungguhnya bukan pada “dapat atau tidaknya kegiatan tersebut dicapai dengan maksimal”, tetapi mau atau tidaknya pihak pemerintah perlu melibatkan ilmu budaya (ilmuwan budaya) dalam setiap kebijakan pemerintah yang mengatasmakan untuk tujuan-tujuan pembangunan, termasuk pengembangan kebudayaan. Kenyataannya, dapat dikatakan setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan hampir dapat dikatakan tidak melibatkan ilmuwan budaya (kalaupun ada hanya pelengkap penyerta saja atau sekedar pelegitimasi). Kondisi ini sepertinya sama halnya dengan kondisi beberapa bidang ilmu sosial pada abad ke-19 yang dianggap kurang menyokong dan menyentuh langsung setiap kebijaksanaan “negara” di Eropa karena dianggap kurang ilmiah; berbeda dengan ilmu alam yang dianggap paling ilmiah dan dapat menyentuh langsung kebijaksanaan negara.

Pemikiran yang menganggap bahwa ilmu alam yang paling ilmiah dan menyentuh langsung persoalan pembangunan dan perkembangan negara ternyata pengaruhnya juga dirasakan di Indonesia sampai saat ini. Soedjatmoko pernah mengeluhkan dan menyatakan bahwa humaniora (ilmu budaya) seharusnya menduduki tempat sentral dalam proses pembangunan. Bahkan, ia berkeyakinan bahwa penyimpangan proses pembangunan selama ini di Indonesia bermula dari proses pengabaian terhadap humaniora. Bagi Soedjatmoko, pelibatan humaniora dalam proses pembangunan tersebut justru sangat semakin penting ketika zaman semakin dikendalikan oleh teknologi saat ini (Soedjatmoko, 1986). Hal itu terjadi karena teknologi dan industri digeluti oleh kalangan ilmuwan ilmu “keras” yang tidak diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan humanitas sehingga titik sentral pembangunan bukan mengarah kepada aspek kemanusiaan,

tetapi kepada teknologi dan industri tersebut. Oleh sebab itu, aspek industrialisasi dan penggunaan teknologi pada akhirnya tak jarang membawa dampak negatif terhadap hidup manusia, terutama lingkungan hidup, ketimpangan dan jarak antara yang kaya dan miskin semakin lebar (Putra, 1994:24). Sayangnya, seperti yang dituduhkan Imron, “hingga saat ini masih terpancang anggapan klise, bahwa bidang-bidang akademis yang dipandang mampu menopang pembangunan adalah ilmu ‘keras’, yang memiliki bentuk penerapan teknologi, dan beberapa ilmu sosial yang dapat menyentuh langsung kebijaksanaan pemerintah seperti ilmu ekonomi” (Imron, 2000:64). Ilmu ‘keras’ dan ekonomi dipandang dapat mendukung kebijakan penerapan teknologi dan industrialisasi secara langsung. Pandangan seperti itu masih sama dengan pandangan masa awal ketika ilmu keras dan ekonomi dimanfaatkan secara besar-besaran oleh kolonial Eropah menghancurkan budaya luar Eropah beberapa abad yang lalu. Sementara itu, Ilmu budaya sepertinya mengalami nasib yang sama dengan ilmu-ilmu sosial pada masa sebelumnya yang dianggap ilmu “masuk keranjang sampah”.

Permasalahan itu barangkali menjadi latar belakang bahwa dasar pembangunan di Indonesia selama ini berlandaskan pada prinsip “pembangunanisme” mengabaikan dasar-dasar humaniora, dan mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga pembangunan selalu menjadi momok bagi kalangan masyarakat tertentu yang kadangkala menghilangkan harkat dan harga diri mereka. Pembangunan yang sesungguhnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat ternyata merugikan dan menjadi motor penghancur. Untuk mendukung doktrin “demi pembangunan” banyak dipraktekkan penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat yang dijalankan tidak manusiawi. Sebagai contoh, banyak proyek pembangunan waduk irigasi dan pembangkit tenaga listrik di Indonesia yang harus menggusur masyarakat dari kampung dan desa mereka. Meskipun sudah diberikan ganti rugi seadanya, masyarakat tetap

dipindahkan dari habitat budaya mereka. Artinya, masyarakat yang dipindahkan akan tercerabut dari “bumi” dan akar kebudayaannya sendiri. Hal ini terjadi karena pembangunan untuk kemajuan bangsa yang hanya mengarahkan terhadap kemajuan teknologi dan ekonomi yang *nota bene* melibatkan ahli-ahli teknologi dan ekonomi yang sering melupakan aspek-aspek kemanusiaan.

Di samping itu, kenyataan lain yang harus diterima adalah pelaksana-pelaksana pembangunan banyak yang korup, yang kehilangan toleransi, tidak etis, “tidak memiliki moral”, degradasi humanitas sehingga memperparah realitas pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pada posisi inilah sebetulnya ilmu budaya harus ditempatkan pada posisi yang seharusnya karena sesungguhnya ilmu budaya mampu memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan terhadap pelaksana pembangunan di setiap kebijakan. Ilmu budaya mampu memupuk rasa teloransi, empati, dan membuat penilaian etis (Imron, 2000:64) untuk memberikan sentuhan terhadap kebijakan, terutama kebijakan teknologi dan ekonomi tersebut.

SIMPULAN

Ilmu budaya pada tataran normatif mempunyai peran ganda. Seperti ilmu lainnya, ilmu budaya dapat berperan sebagai sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan nasional dan sebagai sumber nilai yang mengisi pembentukan watak dan karakter suatu bangsa, terutama dalam membentuk budaya yang masyarakatnya dapat melakukan pemecahan masalah secara kritis, rasional dan logis, obyektif dan terbuka, serta mampu untuk bertindak menjunjung kebenaran dan mengabdikan kepada kepentingan bersama (bukan suku, kelompok, atau interest tertentu) untuk membangun semangat *nation building*.

Pada tataran praktis, ilmu budaya sebetulnya punya peran yang sangat signifikan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Melalui Tridarma Perguruan Tinggi, selain pengajaran Ilmu budaya dapat melakukan perannya secara maksimal, mulai dari unsur pengabdian

masyarakat, ilmuwan budaya dapat juga melakukan peran praktisnya melalui kegiatan “pengabdian” dan pemberdayaan masyarakat dan, melalui penelitian-penelitian, ilmunya dapat melakukan pemetaan potensi-potensi masalah-masalah dan menawarkan solusi masalah-masalah tersebut kepada pihak pemerintah.

Dalam hubungannya dengan pembangunan teknologi dan ekonomi, sesungguhnya ilmu budaya mampu memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan terhadap setiap kebijakan teknologi dan ekonomi. Ilmu budaya mampu memupuk rasa teloransi, empati, dan membuat penilaian etis untuk memberikan sentuhan terhadap kebijakan teknologi dan ekonomi tersebut.

- 1 Pembedaan ilmu tersebut sebetulnya beranjak dari perkembangan dua aliran filsafat yang berbeda pada abad ke-19 M, yaitu filsafat idealisme dan materialisme. Ilmu alam cenderung dipengaruhi oleh materialisme dan ilmu sosial oleh idealisme
- 2 Istilah *nomotetis* berasal dari istilah *nomos* dan *thesein*: *nomos* berarti hukum, dan *thesein* berarti membuat dan menyusun (Beerling, 1986:91).
- 3 Alaxander Irwan dalam Pengantar untuk buku Wallerstein (1997) menyebutnya dengan pendekatan *ideosingkratic*
- 4 Rickert menolak pendirian bahwa ilmu-ilmu sosial, (khususnya ilmu sejarah) harus berusaha mendapatkan hukum-hukum umum (Beerling, 1986:94).
- 5 Wallerstein (1997:8) pada catatan kaki no. 8 menyatakan bahwa *Geisteswissenschaften* sebetulnya adalah terjemahan “ilmu-ilmu kemanusiaan” dalam bahasa Jerman, (yang diterjemahkan secara harfiah dapat diartikan sebagai pengetahuan spiritual atau urusan-urusan mental).

DAFTAR RUJUKAN

- Banks, James A. 1985. *Teaching Strategies for Social Studies, Inquiry, Valuing, and Decision Making*. New York & London: Longman.
- Beerling, R.F. 1986. *Filsafat Dewasa Ini*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fenton, Edwin. 1967. *The New Social Studies*. New York, Chicago, San Fransisco, Toronto, London: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

- Imron, Ali. 2000. "Signifikansi Ilmu-Ilmu Humaniora dalam Pembangunan Bangsa: Perspektif 50 tahun Indonesia Merdeka" dalam Maryadi (ed.). *Transformasi Budaya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 63-81.
- Kartodirdjo, A. Sartono. 1970. "Metodologi Max Weber dan Wilhelm Dilthey" dalam *Lembaran Sedjarah*. No. 6. Desember 1970, hal. 61-72
- Leksono-Supeli, Karlina. 1997. "Humaniora dan Metodologi". Makalah *Seminar Regional Identitas Budaya Melayu dalam Perspektif Humaniora Lustrum III* Fak. Sastra Universitas Andalas, Padang.
- Manan, Imran. 2002. "Peran Ilmu-ilmu Sosial dan Mensikapi Fenomena Sosial Masyarakat Dewasa III". Makalah *Diskusi*. Kopertis Wilayah X Padang.
- Putra, Nusa. 1994. *Pemikiran Soedjatmoko tentang Kebebasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Soedjatmoko.
- Soedjatmoko. 1986. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: IPBES.
- Suriasumantri, Jujun S. 2000. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wallerstein, Immanuel. 1997. "Lintas Batas Ilmu Sosial." Terjemahan oleh Oscar dari (Open The Social Science Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Science). Yogyakarta: IkiS.